



Perencanaan Berperan Besar Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

★ Gde Agung: Setiap SKPD Wajib Lakukan Inovasi



BUPATI Gde Agung selalu hadir acara yang membahas perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung.

MANGUPURA, NusaBali

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung I Wayan Suambara SH MM mengajak jajarannya merencanakan kegiatan dengan baik dengan senantiasa berorientasi pada kebutuhan. Hal itu karena perencanaan berperan vital dalam menentukan arah dan capaian pembangunan, yang bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu juga menindaklanjuti kebijakan Bupati Badung yang menekankan agar segenap SKPD mampu melakukan inovasi (one agency one innovation).

Suambara menjelaskan, perencanaan program pembangunan daerah menganut pendekatan top-down, bottom-up, teknokratik termasuk politis, mengingat pada akhirnya dokumen perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi dokumen APBD ditempuh melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Badung.

Pihaknya mengakui besarnya tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan, antara lain disebabkan oleh tingginya dinamika

sosial ekonomi daerah setiap tahun, seperti dana perimbangan yang terus menurun, demikian pula dana alokasi khusus. Hal ini disebabkan oleh kapasitas fiskal Kabupaten Badung yang semakin menguat dari tahun ke tahun, sehingga diarahkan untuk semakin mandiri dalam membiayai pembangunan daerahnya.

Padahal di sisi lain kebutuhan-kebutuhan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dasar di Kabupaten Badung juga terus meningkat. Kabupaten Badung juga berkewajiban untuk mendistribusikan antara 15–22 persen PAD-nya kepada Pemprov Bali dan enam kabupaten lainnya di Bali. Kondisi ini menuntut adanya review/kaji ulang atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah tersusun.

Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung, dari 6,48 persen pada 2010 menjadi 6,75 persen pada 2014. Demikian pula pendapatan per kapita yang terus tumbuh dari Rp 14,9 juta per kapita/tahun pada 2010 menjadi Rp 23,56 juta per kapita/tahun pada 2014. Selanjutnya tingkat kesenjangan, dengan indikator gini rasio, sekalipun fluktuatif dalam lima tahun terakhir juga selalu di bawah 0,39 yaitu sebesar 0,29 pada 2010 menjadi 0,35 pada 2013 sehingga tingkat kesenjangan masih dalam level rendah. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga terus menurun dari 1,25 persen pada 2010 menjadi 0,48 persen pada 2014. @

Edisi : Senin, 23 Maret 2015

Hal : 2